



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

(RENJA - OPD)

TAHUN ANGGARAN 2022



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Rancangan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017 – 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT semoga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Bangkinang, 01 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**



HAMBALI, SE, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681024 20003 1 002

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	14
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	28
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	29
3.3 Program dan Kegiatan	30
BAB IV PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD S/D Tahun 2019	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD	15
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.....	17
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021	25
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD di jadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja OPD. Dan Renja tahun 2022 adalah tahun terakhir dari kepemimpinan dari kepala daerah yang terpilih.

Sesuai dengan amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2022. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar ini merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar akan dijadikan sebagai pedoman rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang telah ditetapkan

prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran – sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2022 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembantukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
23. Perka BKPM Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14.212 Tanggal 31 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kampar;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
26. Peraturan bupati kampar nomor 68 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu;
27. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022;

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit – unit organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi ;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran kinerja yang akan digunakan oleh pihak – pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi ;

3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam berfikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi ;

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun – tahun sebelumnya.

II.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capai kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

II.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap MDGS (Millenium Development Goals), tantangan dan peluang serta formula isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.4 Review terhadap Rancangan Awal OPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPd dengan analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan.

3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten / Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari peneliti lapangan.

BAB III TUJUAN , SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

III.3 Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal OPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelepasannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar selama tahun 2021 (***tahun berjalan***) dan perkiraan target tahun 2022 (***tahap rancangan penyusunan***). Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2020

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar pada Tahun 2020 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Kampar. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang

telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan :

 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 4. Penyediaan alat tulis kantor
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 9. Penyediaan makanan dan minuman
 10. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 11. Penyediaan jasa tenaga harian lepas

Jumlah Anggaran : Rp. 3.266.165.200,-
Realisasi Anggaran : Rp. 2.971.250.516,-
Persentase Realisasi : 90.97 % (realisasi hingga 31 Desember 2020)
- 2. Program : Peningkatan sarana prasarana aparatur**
Kegiatan :

 1. Pengadaan meubiller
 2. Pengadaan peralatan studio dan komunikasi
 3. Pengadaan komputer PC / Note Book dan Kelengkapannya
 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
 5. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan

Jumlah Anggaran : Rp. 1.723.425.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.654.350.732,-
Persentase Realisasi : 95.99 % (realisasi hingga 31 Desember 2020)
- 3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**
Kegiatan :

 1. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

Jumlah Anggaran : Rp. 232.200.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 231.574.300,-
Persentase Realisasi : 99.73 % (realisasi hingga 31 Desember 2020)

- 4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
Kegiatan : 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan
Jumlah Anggaran : Rp. 11.800.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 11.800.000,-
Persentase Realisasi : 100 % (realisasi hingga 31 Desember 2020)
- 5. Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
Kegiatan : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah
Jumlah Anggaran : Rp. 54.933.500,-
Realisasi Anggaran : Rp. 47.744.500,-
Persentase Realisasi : 86.91 % (realisasi hingga 31 Desember 2020)
- 6. Program : Peningkatan promosi dan kerjasama investasi**
Kegiatan : 1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
3. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
4. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
5. Penyelenggaraan pameran investasi
Jumlah Anggaran : Rp. 1.040.746.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 845.090.757,-
Persentase Realisasi : 81.20 % (realisasi hingga 31 Desember 2020)
- 7. Program : Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi**
Kegiatan : 1. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
2. Pengendalian pengawasan, survey dan evaluasi perizinan

Jumlah Anggaran : Rp. 785.056.800,-
Realisasi Anggaran : Rp. 759.281.800,-

Persentase Realisasi : 96.72 % (realisasi hingga 31 Desember 2020)

- 8. Program : Peningkatan Pelayanan Perizinan**
Kegiatan : 1. Peningkatan kinerja pelayanan perizinan
2. Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Perizinan
Jumlah Anggaran : Rp. 620.425.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 597.715.000,-
Persentase Realisasi : 96.34 % (realisasi hingga 31 Desember 2020)

Anggaran Tahun 2020 DPMPTSP Kabupaten Kampar sebesar **Rp. 7.734.751.500,-** dengan 8 (delapan) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terdapat realisasi atau capaian yang dicapai hingga 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 7.118.807.605,- atau 92.04%**

Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2020, maka hasil capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Kampar (**92.04 %**).

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2021

Untuk tahun anggaran tahun 2021 dengan anggaran sebesar **Rp. 7.603.475.125,-** yang terurai dalam **5 (lima) program 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan** dan di harapkan keberhasilan kinerja mencapai **100 %** atau minimal **95 %** karena ini merupakan tahun ke empat (4) dari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dari pada kepala daerah yang dipilih.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Kampar, pada dasarnya kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kampar adalah sebagai **“pelayanan perizinan”**. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menentukan arah usaha yang akan dijalankan serta penanaman modal bagi investor dari dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program maupun kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi.
2. Keterbatasan alokasi anggaran yang diberikan pada DPMPTSP
3. Keterbatasan sumber daya aparatur.
4. Belum optimalnya kemampuan sumber daya aparatur.
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja aparatur

6. Belum optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah dan dunia usaha dalam hal perizinan penanaman modal.
7. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektifitas program/ kegiatan.
8. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam RENSTRA, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan urusan penanaman modal serta perizinan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2020
KABUPATEN KAMPAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja / Program (outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-4) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja-PD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja-PD Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan wajib									
2.12	Bidang urusan Penanaman Modal									
2.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran								
2.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya biaya tagihan telepon, air, listrik dan internet kantor	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	88.85%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan kebersihan kantor	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya biaya perbaikan peralatan kerja kantor	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	80.43%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk proses administrasi	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan & penggandaan administrasi kantor	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	94.49%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan bagi aparatur	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya biaya makan dan minum rapat dan tamu	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	66.11%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.01.18	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	80.83%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.01.19	Penyediaan jasa tenaga harian lepas	Tersedianya THL pendukung teknis kantor	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%

2.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur								
2.12.02.09	Pengadaan meubiller	Tersedianya meubiller kantor	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.02.12	Pengadaan peralatan studio dan komunikasi	Tersedianya peralatan sudio dan komunikasi kantor	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.02.13	Pengadaan komputer PC / Note Book dan kelengkapannya	Tersedianya komputer PC dan notebook serta kelengkapannya	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin gedung kantor	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.02.23	Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Tersedianya biaya pemeliharaan mobil jabatan kantor	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	66.84%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Realisasi tingkat kehadiran aparatur								
2.12.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus aparatur penanaman modal dan perizinan	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Realisasi rata - rata capaian kinerja ASN								
2.12.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	Tersedianya biaya bimbingan teknis aparatur	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Realisasi Nilai AKIP OPD								
2.12.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan kinerja OPD	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.06.19	Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan OPD	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase pelaksanaan promosi potensi unggulan daerah dan kerjasama investasi								
2.12.15.02	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Tersedianya roadmap potensi unggulan daerah Kabupaten Kampar	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	83.25%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terlaksananya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha dalam bidang penanaman modal	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	71.21%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.15.08	Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya pemantauan, pembinaan serta pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal daerah	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	80.95%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.15.09	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Terwujudnya aparatur Penanaman Modal dan Perizinan yang professional dan handal	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	77.20%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Terlaksananya kegiatan pameran potensi investasi diluar daerah	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%

2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase pelaksanaan sosialisasi, rapat koordinasi dalam bidang penanaman modal								
2.12.16.06	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Terwujudnya penyederhanaan perijinan dan pelayanan penanaman modal	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	96.36%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.16.12	Pengendalian pengawasan, survey dan evaluasi perizinan	Terlaksananya kegiatan pengawasan, survey dan evaluasi perijinan pada dunia usaha	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.18	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase Izin yang diterbitkan								
2.12.18.01	Peningkatan kinerja pelayanan perizinan	Tercapainya pelayanan yang cepat, transparan, dan akurat	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%
2.12.18.03	Peningkatan pelayanan sistem informasi perizinan	Tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	3 Tahun	60%

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapat dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan – kegiatan yang memang benar – benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan – kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitanya dengan keberadaan institusi pelayanan dan perizinan dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Kampar yang membantu Bupati Kabupaten Kampar, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Kampar mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan kualitas pelayanan perizinan tersebut meliputi dan dapat dilihat pada tabel 2.2

Namun peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Kampar dalam peningkatan kualitas produk perizinan dan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan dan penanaman modal;
5. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis;

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n)	Tahun 2018 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n+2)	Tahun 2020 (thn n+3)	Tahun 2021 (thn n+4)	Tahun 2022 (thn n+5)	Tahun 2017 (thn n)	Tahun 2018 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n+2)	Tahun 2020 (thn n+3)	Tahun 2017 (thn n)	Tahun 2018 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	-	-	79%	81%	85%	90%	-	-	79%	80.65%			
2.	Realisasi investasi PMDN dan PMA															
	PMA (\$)	-	-	12.000.000	14.000.000	15.000.000	16.000.000	15.000.000	14.000.000	20.777.600.000	885.724.455.000	134.710.500.000	239.961.600.000	-	-	-
	PMDN (Rp.)	-	-	50.000.000.000	75.000.000.000	100.000.000.000	120.000.000.000	140.000.000.000	150.000.000.000	800.605.400.000	613.283.570.000	1.325.814.500.000	7.431.372.100.000	-	-	-

II.3. ISU –ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efesiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintah yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, maka DPMPTSP Kabupaten Kampar telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal baik PMA maupun PMDM. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal, diantaranya :

1. Tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi pelayanan melalui media elektronik / cetak.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan serta mempermudah dan mempercepat proses / arus pelayanan.
3. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal.
4. Meningkatnya pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada masyarakat dan pengusaha.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur perizinan khususnya perizinan penanaman modal.
6. Terciptanya pelayanan perizinan yang transparan, cepat, tepat dan murah.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan salah satu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan, dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya. Program prioritas pembangunan daerah memuat program – program yang berorientasi pada pemenuhan hak – hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Sedangkan rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun – tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pada Tabel 2.4 berikut disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA		9.863.987.778,-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA		9.863.987.778,-	
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		173.000.000,-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		173.000.000,-	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya dokumen perencanaan tahunan OPD	100%	113.000.000,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya dokumen tahunan OPD	100%	80.830.320,-	Prioritas
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	100%	12.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	100%	11.406.759,-	Prioritas
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	100%	12.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	100%	11.550.887,-	Prioritas
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	100%	12.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	100%	0,-	Belum Prioritas
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	100%	12.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	100%	0,-	Belum Prioritas
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan kinerja OPD	100%	12.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan kinerja OPD	100%	31.223.242,-	Prioritas
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Terhadap Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.127.987.778,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Terhadap Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.999.566.586,-	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar	Persentase terhadap penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	6.115.987.778,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar	Persentase terhadap penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	5.990.549.264,-	Prioritas

2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun OPD	100%	12.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun OPD	100%	9.017.322,-	Prioritas
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Capaian Terhadap Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		425.000.000,-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Capaian Terhadap Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		132.539.500,-	
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur	Kab. Kampar	Persentase terhadap pemenuhan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur	100%	50.000.000,-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur	Kab. Kampar	Persentase terhadap pemenuhan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur	100%	0,-	Belum Prioritas
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kampar	Persentase terhadap penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	85.000.000,-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kampar	Persentase terhadap penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	97.387.500,-	Prioritas
3.	Sosialisasi peraturan perundang – undangan	Kab. Kampar	Persentase terhadap terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang – undangan	100%	150.000.000,-	Sosialisasi peraturan perundang – undangan	Kab. Kampar	Persentase terhadap terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang – undangan	100%	0,-	Belum Prioritas
4.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya bimbingan teknis aparatur	100%	140.000.000,-	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya bimbingan teknis aparatur	100%	35.152.000,-	Prioritas
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Capaian Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah		958.000.000,-	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Capaian Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.067.018.819,-	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya komponen instalasi listrik kantor	100%	5.000.000,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya komponen instalasi listrik kantor	100%	4.934.875,-	Prioritas
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	180.000.000,-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	170.799.298,-	Prioritas
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya Bahan Logistik kantor	100%	175.000.000,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya Bahan Logistik kantor	100%	152.001.536,-	Prioritas
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	85.000.000,-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	101.011.110,-	Prioritas
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan bagi aparatur	100%	13.000.000,-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan bagi aparatur	100%	9.000.000,-	Prioritas
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya perjalanan dinas aparatur	100%	500.000.000,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya perjalanan dinas aparatur	100%	629.272.000,-	Prioritas
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		Persentase Capaian Terhadap Pengadaan		650.000.000,-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		Persentase Capaian Terhadap Pengadaan		664.002.604,-	

	Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	100%	250.000.000,-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	100%	0,-	Belum Prioritas
2.	Pengadaan Mebel	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya meubiller kantor	100%	175.000.000,-	Pengadaan Mebel	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya meubiller kantor	100%	167.659.000,-	Prioritas
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	75.000.000,-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	202.013.260,-	Prioritas
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	100.000.000,-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	84.230.344,-	Prioritas
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	50.000.000,-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	210.100.000,-	Prioritas
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.090.000.000,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.631.665.200,-	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya materai untuk proses administrasi	100%	5.000.000,-	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya materai untuk proses administrasi	100%	0,-	Belum Prioritas
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya tagihan telepon, air, listrik dan internet kantor	100%	185.000.000,-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya tagihan telepon, air, listrik dan internet kantor	100%	146.485.200,-	Prioritas
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	50.000.000,-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	0,-	Belum Prioritas
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	850.000.000,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	1.485.180.000,-	Prioritas
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		340.000.000,-			Persentase Capaian Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.052.321.030,-	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	100%	85.000.000,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	100%	184.143.370,-	Prioritas

	Dinas Operasional atau Lapangan		Dinas Operasional atau Lapangan			Dinas Operasional atau Lapangan		Dinas Operasional atau Lapangan			
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	30.000.000,-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	33.878.250,-	Prioritas
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	175.000.000,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	624.199.410,-	Prioritas
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	50.000.000,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	210.100.000,-	Prioritas
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		755.127.613,-	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
I.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Terhadap Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		350.000.000,-	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Terhadap Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		0,-	
1.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase terciptanya kemitraan/kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil melalui pemberdayaan usaha kecil menengah	100%	175.000.000,-	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase terciptanya kemitraan/kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil melalui pemberdayaan usaha kecil menengah	100%	0,-	Belum Prioritas
2.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Percentase terlaksananya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha dalam bidang penanaman modal	100%	175.000.000,-	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Percentase terlaksananya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha dalam bidang penanaman modal	100%	0,-	Belum Prioritas
II.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Terhadap Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		405.127.613,-			Persentase Capaian Terhadap Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		357.358.354,-	
1.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah	100%	200.000.000,-	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah	100%	201.967.427,-	Prioritas

2.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Persentase tersedianya media promosi potensi unggulan daerah pada lokasi potensi investasi	100%	205.127.613,-	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Persentase tersedianya media promosi potensi unggulan daerah pada lokasi potensi investasi	100%	155.390.927,-	Prioritas
C.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		675.000.000,-	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		321.500.053,-	
I.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Terhadap Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		675.000.000,-	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Terhadap Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		321.500.053,-	
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah	100%	175.000.000,-	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah	100%	0,-	Belum Prioritas
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Persentase terlaksananya kegiatan pameran potensi investasi diluar daerah	100%	500.000.000,-	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Persentase terlaksananya kegiatan pameran potensi investasi diluar daerah	100%	321.500.053,-	Prioritas
D.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		865.000.000,-	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		1.048.579.455,-	
I.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		865.000.000,-	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1.048.579.455,-	
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kampar	Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	100%	200.000.000,-	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Nasional	Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	100%	0,-	Belum Prioritas
2.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase terhadap Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	100%	300.000.000,-	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Internasional	Persentase terhadap Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	100%	467.580.928,-	Prioritas

3.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kab. Kampar	Persentase tersedianya laporan indeks kepuasan masyarakat	100%	200.000.000,-	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kab. Kampar	Persentase tersedianya laporan indeks kepuasan masyarakat	100%	221.964.133,-	Prioritas
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Kampar	Persentase terwujudnya koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara pelayanan perizinan	100%	165.000.000,-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Kampar	Persentase terwujudnya koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara pelayanan perizinan	100%	359.034.394,-	Prioritas
E.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		600.000.000,-	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		325.930.000,-	
I.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Terhadap Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		600.000.000,-	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Terhadap Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		325.930.000,-	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	200.000.000,-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	52.550.000,-	Prioritas
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	200.000.000,-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	178.080.000,-	Prioritas
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	200.000.000,-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	95.300.000,-	Prioritas
F.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		200.000.000,-	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		168.237.485,-	
I.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang		Persentase Capaian Terhadap Pengelolaan Data dan Informasi		200.000.000,-	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang		Persentase Capaian Terhadap Pengelolaan Data dan Informasi			

	Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kampar	Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	100%	200.000.000,-	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kampar	Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	100%	168.237.485,-	Prioritas
	JUMLAH				12.959.115.391,-	JUMLAH				12.903.730.294,-	

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2022 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar 2017 - 2022 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2017 – 2022 yaitu : “ **TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG DUNIA USAHA YANG PRIMA, DAN PROFESIONAL UNTUK MENDORONG PENINGKATAN PERSAINGAN INVESTASI GLOBAL** ”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM pelayanan perizinan yang profesional dan terpadu dalam rangka peningkatan peluang usaha menjadi investasi riil, serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Mewujudkan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pelayanan perizinan yang prima dengan menerapkan konsep Good Government.
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi peluang investasi bagi investor, masyarakat dunia usaha dan industri.
4. Mempromosikan produk unggulan daerah dan membuka peluang investasi untuk pemerataan ekonomi masyarakat.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Di samping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penjabaran dari usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kampar **tidak ada / nihil**.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

25

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

Analisis lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threat*). Dalam analisis ini akan diidentifikasi dan diinteraksikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Sebagai langkah awal dalam analisis, perlu diketahui awal dan kondisi yang diharapkan oleh organisasi. Adapun kondisi awal DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu cenderung bersikap OPD teknis pengelola izin dan penanaman modal.
2. Belum optimalnya mutu pelayanan yang meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.
3. Sebagian besar kegiatan pelayanan yang dilaksanakan belum terstandar dan dalam pembiayaan belum mempunyai indeks biaya.
4. Hubungan kerja/ koordinasi teknis antara sesama OPD pengelola izin belum optimal.
5. Belum jelasnya skala prioritas pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
6. Belum terhimpunya data akurat dan aktual yang mendukung kegiatan penanaman modal.
7. Belum optimalnya pemberdayaan bidang penanaman modal sebagai sumber pendapatan daerah dan salah satu faktor pengungkit pembangunan ekonomi.
8. Rendahnya hubungan dengan pihak ketiga baik pada tingkat daerah, nasional maupun internasional.
9. Belum jelasnya acuan pengembangan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka situasi masa depan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Menjadi fasilitator administrasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
2. Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi manajemen.
3. Pelayanan perizinan dan penanaman modal yang akan dilaksanakan telah terstandar serta dalam pembiayaan mempunyai standar biaya yang realistis.
4. Mantapnya koordinasi internal antar unit kerja pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan semua OPD pengelola izin.
5. Adanya skala prioritas pelayanan perizinan dan penanaman modal.
6. Terhimpunya data akurat dan aktual untuk mendukung kegiatan penanaman modal.
7. Terwujudnya peran yang optimal bidang penanaman modal dalam peningkatan pendapatan daerah dan sebagai pengungkit pembangunan ekonomi.
8. Harmonisnya hubungan dengan pihak ketiga.

9. Tersusunnya acuan pengembangan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu (PTSP) merupakan pedoman, mengatur kisi-kisi dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntutan dan kebutuhan daerah. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengolahannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen dilaksanakan disatu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/ non dan Bupati kepada kepala PTSP dan penyederhanaan perizinan dengan mempercepat waktu, sistem prosedur persyaratan dan biaya.

Kendala yang dihadapi daerah yang belum membentuk :

- a. Persepsi dan komitmen kepala daerah dengan para stakeholder belum mantap.
- b. Belum ada pemahaman yang komprehensif tentang PTSP.
- c. Mindset birokrasi masih belum reformis.
- d. Tidak adanya inisiator daerah dan dukungan pimpinan daerah.
- e. Filosofi reformasi perizinan :
 1. Penyelenggaraan PTSP berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, disyaratkan ada prasarana loket, tempat proses, tempat pembayaran, penyerahan dokumen, ruang pengaduan dan sekretariat.
 2. Penyederhanaan proses, penyingkatan waktu dan kepastian biaya.
 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), utamakan Profesional/ kompetensi dan Performance.
 4. Kebutuhan informasi dan pemanfaatan TI.
 5. Pengaduan dan kepuasan pelanggan.
 6. Pembinaan/ pengawasan dan monev.
 7. Peraturan peralihan :
 - a. PTSP/ OSS yang sudah ada agar menyesuaikan dengan Permendagri No. 138 Tahun 2017.
 - b. Yang belum membentuk PTSP wajib membentuk paling lambat setelah 1 (satu) tahun.
 - c. Kelembagaan PTSP di daerah.

Pembentukan PTSP diatur berdasarkan Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah.

A. Dasar ketetapan :

1. Diterbitkan dalam rangka pelaksanaan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.
2. Damanatkan bahwa organisasi dan tatakerja unit pelayanan perizinan terpadu diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten / Kota.
3. Dengan mendapat pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perizinan dibentuk unit pelayanan perizinan terpadu dengan sebutan Dinas.

Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 yang merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk diintegrasikan kedalam lembaga penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor keberhasilan (Critical Success Faktor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

DPMPTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perizinan serta penanaman modal dan membantu Bupati Kabupaten Kampar dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perizinan dan penanaman modal dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa dokumen-dokumen perizinan yang bisa dipertanggung jawabkan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kampar pada dasarnya kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah sebagai “Pelayanan Perizinan” setiap program dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan usaha.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Kampar Tahun 2017 - 2022 yaitu “ ***Mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai wilayah industri berbasis pertanian dan perkebunan, dengan masyarakat yang berakhlak, berbudaya, dan beradab menuju masyarakat sejahtera*** “

Dan sesuai dengan Visi DPMPTSP Tahun 2017 – 2022 yaitu “ ***Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Dunia Usaha yang Prima, dan Profesional untuk mendorong Peningkatan Persaingan Investasi Global*** ”, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2022 terdiri dari :

III.3 PROGRAM/KEGIATAN/DAN SUB KEGIATAN

A. PROGRAM PENDUKUNG :

I. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. *Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*
 - b. *Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*
2. Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - a. *Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*
 - b. *Sub Kegiatan : Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota*

II. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. *Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal*
 - b. *Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*

III. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewengan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. *Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*
 - b. *Sub Kegiatan : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal*
 - c. *Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan*
 - d. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah*

IV. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal*
 - b. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal*

- c. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*

V. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- 1. Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. *Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*

B. PROGRAM PENUNJANG

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. *Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
 - b. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
 - c. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
 - d. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*
 - e. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*
 - f. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
- 2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. *Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
 - b. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
- 3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. *Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur*
 - b. *Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*
 - c. *Sub Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang – undangan*
 - d. *Sub Kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan*
- 4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. *Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor*
 - b. *Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
 - c. *Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*
 - d. *Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
 - e. *Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
 - f. *Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan*

- g. *Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material*
- h. *Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
- 5. *Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - a. *Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
 - b. *Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - c. *Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel*
 - d. *Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - e. *Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
 - f. *Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
- 6. *Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - a. *Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat*
 - b. *Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*
 - c. *Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
 - d. *Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- 7. *Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - a. *Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - b. *Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - c. *Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*
 - d. *Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

Urusan kegiatan dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel 3.3 (terlampir)

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN KAMPAR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lembar 1 dari 3

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA			10.531.487.778,-				11.865.987.778,-
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kampar	100%	272.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	222.000.000,-
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terhadap tersusunnya dokumen perencanaan tahunan OPD	Kab. Kampar	100%	200.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	150.000.000,-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar	100%	15.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	15.000.000,-
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar	100%	15.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	15.000.000,-
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kampar	100%	12.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	12.000.000,-
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kampar	100%	15.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	15.000.000,-
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan kinerja OPD	Kab. Kampar	100%	15.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	15.000.000,-
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kampar	100%	6.130.987.778,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	6.130.987.778,-
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terhadap penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Kampar	100%	6.115.987.778,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	6.115.987.778,-

2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun OPD	Kab. Kampar	100%	15.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	15.000.000,-
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nasional	100%	495.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	550.000.000,-
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur	Persentase terhadap pemenuhan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur	Kab. Kampar	100%	50.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	50.000.000,-
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terhadap penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Kampar	100%	85.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	100.000.000,-
3.	Sosialisasi peraturan perundang – undangan	Persentase terhadap terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang – undangan	Kab. Kampar	100%	170.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	200.000.000,-
4.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	Persentase terhadap tersedianya biaya bimbingan teknis aparatur	Nasional	100%	190.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	200.000.000,-
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kampar	100%	1.223.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	1.282.000.000,-
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terhadap tersedianya komponen instalasi listrik kantor	Kab. Kampar	100%	5.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	7.000.000,-
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terhadap tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kampar	100%	200.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	200.000.000,-
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terhadap tersedianya Bahan Logistik kantor	Kab. Kampar	100%	200.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	200.000.000,-
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terhadap tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Kampar	100%	105.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	110.000.000,-
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Persentase terhadap tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan bagi aparatur	Kab. Kampar	100%	13.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	15.000.000,-
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terhadap tersedianya biaya perjalanan dinas aparatur	Nasional	100%	700.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	750.000.000,-
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kampar	100%	860.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	1.225.000.000,-

1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terhadap tersedianya Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Kab. Kampar	100%	350.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	500.000.000,-
2.	Pengadaan Mebel	Persentase terhadap tersedianya meubiller kantor	Kab. Kampar	100%	200.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	200.000.000,-
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terhadap tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	100%	85.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	150.000.000,-
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Kampar	100%	150.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	200.000.000,-
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Kampar	100%	75.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	175.000.000,-
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nasional	100%	1.145.500.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	1.856.000.000,-
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase terhadap tersedianya materiail untuk proses administrasi	Kab. Kampar	100%	5.500.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	6.000.000,-
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase terhadap tersedianya biaya tagihan telepon, air, listrik dan internet kantor	Kab. Kampar	100%	190.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	175.000.000,-
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terhadap tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kampar	100%	50.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	175.000.000,-
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terhadap tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Kab. Kampar	100%	900.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	1.500.000.000,-
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kampar	100%	405.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	600.000.000,-
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terhadap tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar	100%	100.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	150.000.000,-
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Kampar	100%	50.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	50.000.000,-

3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terhadap biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Kampar	100%	180.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	200.000.000,-
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terhadap biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	100%	75.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	200.000.000,-
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pekanbaru	100%	1.100.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	1.150.000.000,-
I.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	100%	450.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	500.000.000,-
1.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase terciptanya kemitraan/kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil melalui pemberdayaan usaha kecil menengah	Kab. Kampar	100%	250.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	250.000.000,-
2.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Percentase terlaksananya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha dalam bidang penanaman modal	Kab. Kampar	100%	200.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	250.000.000,-
II.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	100%	650.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	650.000.000,-
1.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah	Kab. Kampar	100%	300.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	300.000.000,-
2.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya media promosi potensi unggulan daerah pada lokasi potensi investasi	Kab. Kampar	100%	350.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	350.000.000,-
C.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Kampar	100%	950.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	1.050.000.000,-

I.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nasional/ Internasional	100%	950.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	1.050.000.000,-
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah	Kab. Kampar	100%	200.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	200.000.000,-
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pameran potensi investasi diluar daerah	Nasional	100%	750.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	850.000.000,-
D.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Kampar	100%	1.350.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	1.450.000.000,-
I.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewengan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewengan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	100%	1.350.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	1.450.000.000,-
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	Kab. Kampar	100%	250.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	250.000.000,-
2.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Persentase terhadap Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab. Kampar	100%	600.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	600.000.000,-
3.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Persentase tersedianya laporan indeks kepuasan masyarakat	Kab. Kampar	100%	300.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	300.000.000,-
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase terwujudnya koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara pelayanan perizinan	Kab. Kampar	100%	200.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	300.000.000,-
E.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab. Kampar	100%	750.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	650.000.000,-

I.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	100%	750.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	650.000.000,-
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kampar	100%	250.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	200.000.000,-
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kampar	100%	250.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	250.000.000,-
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kampar	100%	250.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	200.000.000,-
F.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab. Kampar	100%	250.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	225.000.000,-
I.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	100%	250.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	225.000.000,-
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	Kab. Kampar	100%	250.000.000,-	APBD Kab. Kampar	Kondisi Kinerja 100% pada Akhir RPJMD	100%	225.000.000,-
	JUMLAH				14.931.487.778,-				16.390.987.778,-

BAB. IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah **Program Tahunan** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Dan rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 ini adalah merupakan rencana kerja tahun kelima atau tahun terakhir dalam periode pemerintahan Bupati Terpilih Daerah Kabupaten Kampar.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN INDIKASI PENDANAAN DPMTSP KABUPATEN KAMPAR
BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
TAHUN 2017 -2022

TAHUN 2021								TAHUN 2022							
KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
X	NON URUSAN						9,863,987,778.00	X	NON URUSAN						10,531,487,778.00
X.XX		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA			PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA	100%	9,863,987,778.00	X.XX		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA			PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA	100%	10,531,487,778.00
X.XX.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase Capaian Terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	173,000,000.00	X.XX.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase Capaian Terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	272,000,000.00
X.XX.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Persentase terhadap tersusunnya dokumen perencanaan tahunan OPD</i>	100%	113,000,000.00	X.XX.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Persentase terhadap tersusunnya dokumen perencanaan tahunan OPD</i>	100%	200,000,000.00
X.XX.01.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD</i>	100%	12,000,000.00	X.XX.01.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD</i>	100%	15,000,000.00
X.XX.01.2.01.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD</i>	100%	12,000,000.00	X.XX.01.2.01.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD</i>	100%	15,000,000.00
X.XX.01.2.01.04				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	<i>Persentase terhadap tersusunnya Dokumen DPA-SKPD</i>	100%	12,000,000.00	X.XX.01.2.01.04				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	<i>Persentase terhadap tersusunnya Dokumen DPA-SKPD</i>	100%	12,000,000.00

X.XX.01.2.01.05				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	<i>Persentase terhadap tersusunnya Dokumen DPA-SKPD</i>	100%	12,000,000.00	X.XX.01.2.01.05				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	<i>Persentase terhadap tersusunnya Dokumen DPA-SKPD</i>	100%	15,000,000.00
X.XX.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan kinerja OPD</i>	100%	12,000,000.00	X.XX.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan kinerja OPD</i>	100%	15,000,000.00
X.XX.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase Capaian Terhadap Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	6,127,987,778.00	X.XX.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase Capaian Terhadap Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	6,130,987,778.00
X.XX.01.2.02.001				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Persentase terhadap penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i>	100%	6,115,987,778.00	X.XX.01.2.02.001				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Persentase terhadap penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i>	100%	6,115,987,778.00
X.XX.01.2.02.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun OPD</i>	100%	12,000,000.00	X.XX.01.2.02.05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun OPD</i>	100%	15,000,000.00
X.XX.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase Capaian Terhadap Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	445,000,000.00	X.XX.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase Capaian Terhadap Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	495,000,000.00
X.XX.01.2.05.01				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur	<i>Persentase terhadap pemenuhan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur</i>	100%	50,000,000.00	X.XX.01.2.05.01				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur	<i>Persentase terhadap pemenuhan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur</i>	100%	50,000,000.00
X.XX.01.2.05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Persentase terhadap penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya</i>	100%	85,000,000.00	X.XX.01.2.05.02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Persentase terhadap penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya</i>	100%	85,000,000.00
X.XX.01.2.05.10				Sosialisasi peraturan perundang – undangan	<i>Persentase terhadap terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang – undangan</i>	100%	150,000,000.00	X.XX.01.2.05.10				Sosialisasi peraturan perundang – undangan	<i>Persentase terhadap terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang – undangan</i>	100%	170,000,000.00

X.XX.01.2.05.11				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	<i>Persentase terhadap tersedianya biaya bimbingan teknis aparatur</i>	100%	160,000,000.00	X.XX.01.2.05.11				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	<i>Persentase terhadap tersedianya biaya bimbingan teknis aparatur</i>	100%	190,000,000.00
X.XX.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase Capaian Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	1,013,000,000.00	X.XX.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase Capaian Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	1,223,000,000.00
X.XX.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	<i>Persentase terhadap tersedianya komponen instalasi listrik kantor</i>	100%	5,000,000.00	X.XX.01.2.06.01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	<i>Persentase terhadap tersedianya komponen instalasi listrik kantor</i>	100%	5,000,000.00
X.XX.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Persentase terhadap tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	100%	200,000,000.00	X.XX.01.2.06.02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Persentase terhadap tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	100%	200,000,000.00
X.XX.01.2.06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Persentase terhadap tersedianya peralatan rumah tangga</i>	100%	-	X.XX.01.2.06.03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Persentase terhadap tersedianya peralatan rumah tangga</i>	100%	-
X.XX.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Persentase terhadap tersedianya Bahan Logistik kantor</i>	100%	195,000,000.00	X.XX.01.2.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Persentase terhadap tersedianya Bahan Logistik kantor</i>	100%	200,000,000.00
X.XX.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Persentase terhadap tersedianya barang cetakan dan penggandaan</i>	100%	100,000,000.00	X.XX.01.2.06.05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Persentase terhadap tersedianya barang cetakan dan penggandaan</i>	100%	105,000,000.00
X.XX.01.2.06.06				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	<i>Persentase terhadap tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan bagi aparatur</i>	100%	13,000,000.00	X.XX.01.2.06.06				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	<i>Persentase terhadap tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan bagi aparatur</i>	100%	13,000,000.00
X.XX.01.2.06.07				Penyediaan Bahan/Material	<i>Persentase terhadap tersedianya bahan/material</i>	100%	-	X.XX.01.2.06.07				Penyediaan Bahan/Material	<i>Persentase terhadap tersedianya bahan/material</i>	100%	-

X.XX.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Persentase terhadap tersedianya biaya perjalanan dinas aparatur</i>	100%	500,000,000.00	X.XX.01.2.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Persentase terhadap tersedianya biaya perjalanan dinas aparatur</i>	100%	700,000,000.00
X.XX.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Persentase Capaian Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	675,000,000.00	X.XX.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Persentase Capaian Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	860,000,000.00
X.XX.01.2.07.01				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Persentase terhadap tersedianya Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>	100%	-	X.XX.01.2.07.01				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Persentase terhadap tersedianya Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>	100%	350,000,000.00
X.XX.01.2.07.02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Persentase terhadap tersedianya Kendaraan Dinas operasional atau lapangan</i>	100%	250,000,000.00	X.XX.01.2.07.02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Persentase terhadap tersedianya Kendaraan Dinas operasional atau lapangan</i>	100%	-
X.XX.01.2.07.05				Pengadaan Mebel	<i>Persentase terhadap tersedianya meubiller kantor</i>	100%	200,000,000.00	X.XX.01.2.07.05				Pengadaan Mebel	<i>Persentase terhadap tersedianya meubiller kantor</i>	100%	200,000,000.00
X.XX.01.2.07.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Persentase terhadap tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	100%	75,000,000.00	X.XX.01.2.07.06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Persentase terhadap tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	100%	85,000,000.00
X.XX.01.2.07.10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	100%	100,000,000.00	X.XX.01.2.07.10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	100%	150,000,000.00
X.XX.01.2.07.11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	100%	50,000,000.00	X.XX.01.2.07.11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	100%	75,000,000.00
X.XX.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Capaian Terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	1,090,000,000.00	X.XX.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Capaian Terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	1,145,500,000.00

X.XX.01.2.08.01				Penyediaan jasa surat menyurat	<i>Persentase terhadap tersedianya materai untuk proses administrasi</i>	100%	5,000,000.00	X.XX.01.2.08.01				Penyediaan jasa surat menyurat	<i>Persentase terhadap tersedianya materai untuk proses administrasi</i>	100%	5,500,000.00
X.XX.01.2.08.02				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<i>Persentase terhadap tersedianya biaya tagihan telepon, air, listrik dan internet kantor</i>	100%	185,000,000.00	X.XX.01.2.08.02				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<i>Persentase terhadap tersedianya biaya tagihan telepon, air, listrik dan internet kantor</i>	100%	190,000,000.00
X.XX.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Persentase terhadap tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	100%	50,000,000.00	X.XX.01.2.08.03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Persentase terhadap tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	100%	50,000,000.00
X.XX.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Persentase terhadap tersedianya jasa pelayanan umum kantor</i>	100%	850,000,000.00	X.XX.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Persentase terhadap tersedianya jasa pelayanan umum kantor</i>	100%	900,000,000.00
X.XX.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Capaian Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	340,000,000.00	X.XX.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Capaian Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	405,000,000.00
X.XX.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Persentase terhadap tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	100%	85,000,000.00	X.XX.01.2.09.02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Persentase terhadap tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	100%	100,000,000.00
X.XX.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	100%	30,000,000.00	X.XX.01.2.09.06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	100%	50,000,000.00
X.XX.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	100%	175,000,000.00	X.XX.01.2.09.09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	100%	180,000,000.00
X.XX.01.2.09.11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Persentase terhadap tersedianya biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	100%	50,000,000.00	X.XX.01.2.09.11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Persentase terhadap tersedianya biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	100%	75,000,000.00

02.18	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,095,127,613.00	02.18	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,400,000,000.00
02.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100%	755,127,613.00	02.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100%	1,100,000,000.00
02.18.02.2.01			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase Capaian Terhadap Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	350,000,000.00	02.18.02.2.01			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase Capaian Terhadap Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	450,000,000.00
02.18.02.2.01.01				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	<i>Persentase terciptanya kemitraan/kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil melalui pemberdayaan usaha kecil menengah</i>	100%	175,000,000.00	02.18.02.2.01.01			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		<i>Persentase terciptanya kemitraan/kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil melalui pemberdayaan usaha kecil menengah</i>	100%	250,000,000.00
02.18.02.2.01.02				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	<i>Percentase terlaksananya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha dalam bidang penanaman modal</i>	100%	175,000,000.00	02.18.02.2.01.02			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		<i>Percentase terlaksananya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha dalam bidang penanaman modal</i>	100%	200,000,000.00
02.18.02.2.02			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		<i>Persentase Capaian Terhadap Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	100%	405,127,613.00	02.18.02.2.02			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		<i>Persentase Capaian Terhadap Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	100%	650,000,000.00
02.18.02.2.02.01				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah</i>	100%	200,000,000.00	02.18.02.2.02.01			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah</i>	100%	300,000,000.00
02.18.02.2.02.02				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	<i>Persentase tersedianya media promosi potensi unggulan daerah pada lokasi potensi investasi</i>	100%	205,127,613.00	02.18.02.2.02.02			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		<i>Persentase tersedianya media promosi potensi unggulan daerah pada lokasi potensi investasi</i>	100%	350,000,000.00

02.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100%	675,000,000.00	02.18.03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100%	950,000,000.00
02.18.03.2.01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase Capaian Terhadap Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	675,000,000.00	02.18.03.2.01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase Capaian Terhadap Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	950,000,000.00
02.18.03.2.01.01				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	<i>Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah</i>	100%	175,000,000.00	02.18.03.2.01.01				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	<i>Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah</i>	100%	200,000,000.00
02.18.03.2.01.02				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase terlaksananya kegiatan pameran potensi investasi diluar daerah</i>	100%	500,000,000.00	02.18.03.2.01.02				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase terlaksananya kegiatan pameran potensi investasi diluar daerah</i>	100%	750,000,000.00
02.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		865,000,000.00	02.18.04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		1,350,000,000.00
02.18.04.2.01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewengan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase Capaian Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewengan Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	865,000,000.00	02.18.04.2.01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewengan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase Capaian Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewengan Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	1,350,000,000.00
02.18.04.2.01.01				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu</i>	100%	200,000,000.00	02.18.04.2.01.01				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu</i>	100%	250,000,000.00
02.18.04.2.01.02				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	<i>Persentase terhadap Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal</i>	100%	300,000,000.00	02.18.04.2.01.02				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	<i>Persentase terhadap Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal</i>	100%	600,000,000.00

02.18.04.2.01.03				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	<i>Persentase tersedianya laporan indeks kepuasan masyarakat</i>	100%	200,000,000.00	02.18.04.2.01.03			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	<i>Persentase tersedianya laporan indeks kepuasan masyarakat</i>	100%	300,000,000.00
02.18.04.2.01.04				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	<i>Persentase terwujudnya koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara pelayanan perizinan</i>	100%	165,000,000.00	02.18.04.2.01.04			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	<i>Persentase terwujudnya koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara pelayanan perizinan</i>	100%	200,000,000.00
02.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	100%	600,000,000.00	02.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	100%	750,000,000.00
02.18.05.2.01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase Capaian Terhadap Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	600,000,000.00	02.18.05.2.01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Capaian Terhadap Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	750,000,000.00
02.18.04.2.01.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	<i>Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	100%	200,000,000.00	02.18.04.2.01.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	<i>Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	100%	250,000,000.00
02.18.04.2.01.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	<i>Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	100%	200,000,000.00	02.18.04.2.01.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	<i>Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	100%	250,000,000.00
02.18.04.2.01.03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	<i>Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	100%	200,000,000.00	02.18.04.2.01.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	<i>Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	100%	250,000,000.00
02.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100%	200,000,000.00	02.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100%	250,000,000.00

[illegible]